

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pendidikan suatu bangsa sangat erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah yang berkuasa, terutama kebijakan politik dan agama yang hampir pasti akan dilakukan dan tentu saja berdampak pada pendidikan, khususnya pendidikan Islam di Banten. Demikian juga pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda banyak dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan dikeluarkan oleh penjajah.¹ Kebijakan yang coba dibangun oleh Belanda, telah memaksa perubahan, khususnya di Banten, apalagi sejak saat itu daerah yang ada di wilayah Banten telah mengalami *shock*,² karena penetrasi yang dilakukan oleh kolonial secara represif dan ekspansif, telah merusak tatanan kehidupan rakyat Banten.

Hal demikian membuat pergumulan politik yang dibuat Belanda melalui kebijakan politik, telah menimbulkan rasa kebencian yang mendalam terhadap kolonialisme, sehingga sebagian dari elit agama membentuk kelompok perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Semisal guru agama atau kiai tidak hanya mengambil jarak dengan pemerintah kolonial, tapi juga menjadikan kegiatan-kegiatan sosial-keagamaan itu dinyatakan sebagai jalan jihad melawan kolonialisme Belanda.

¹ Anhar Gonggong, Soenjata Kartadarmadja, Muchtaruddin Ibrahim, *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Lampung*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1993), 15-16

² E Syibli Syarjaya dan Jihaduddin, *Dirosah Islamiyah I :Sejarah dan Khithah Mathlau'ul Anwar* (Jakarta: Pengurus Besar Mathla'ul Anwar, 2007), 1.

Pada dasarnya pendidikan yang diselenggarakan pemerintah Hindia Belanda untuk kaum pribumi yang notabene muslim, sesungguhnya bertujuan untuk menjadikan warga negara yang mengabdikan kepada kepentingan Belanda. Pendidikan pada masa itu memunculkan dua ide dalam menentukan model sekolah pribumi saat itu, oleh Snouck Hurgronje cenderung kepada pendidikan gaya Eropa dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dengan tujuan untuk menciptakan elit pribumi untuk diketahui bagaimana cara berterima kasih dan bersedia bekerjasama, untuk memperkecil anggaran belanja pemerintah serta mengendalikan fanatisme Islam, dan agar menjadi keteladanan yang akan menjiwai masyarakat dikalangan bawah. Sedangkan Iden Brur dan Jendral Van Heutsz mendukung pendidikan yang lebih mendasar dan praktis dengan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar bagi sekolah pribumi tersebut. Kebijakan kolonial berdampak serius terhadap pendidikan khususnya pendidikan Islam sehingga terjadinya ordonansi terhadap guru. Ordonansi Guru yang berlaku sejak 2 Nopember 1905,³ ordonansi ini diberlakukan untuk Jawa-Madura, kecuali Yogya dan Solo.⁴ Ordonansi Guru ini memiliki dampak besar pada pendidikan di

³ Ordonansi Guru yang dikeluarkan pada 2 November 1905 adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mengatur profesi guru di Hindia Belanda (sekarang Indonesia). Beberapa isi penting dari ordonansi ini antara lain: Guru harus memiliki ijazah dari sekolah guru atau sekolah menengah dan harus lulus ujian sertifikasi, Seorang guru agama Islam baru dibenarkan mengajar bila sudah memperoleh izin dari Bupati. Izin tersebut baru bisa diberikan bila guru agama tersebut mempunyai kualifikasi yang baik, dan pelajaran yang diberikan tidak bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum. Guru agama harus mengisi daftar murid, dan harus menjelaskan pelajaran yang ia sampaikan. Bupati dan instansi yang berwenang boleh memeriksa daftar itu sewaktu-waktu melanggar ketentuan yang berlaku. Izin mengajar bisa dicabut bila ternyata berkali-kali guru agama tersebut melanggar peraturan, atau dinilai kurang berkelakuan kurang baik. Lihat Aqib Suminto, *Politik Islam Kolonial Hindia Belanda*, 34

⁴ Aqib Suminto, *Politik Islam Kolonial Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1985), 35

Hindia Belanda karena mengatur kualifikasi guru dan memberikan standar bagi profesi guru. Namun, ordonansi ini juga dikritik oleh kalangan organisasi keagamaan, karena memberikan kekuasaan besar kepada pemerintah kolonial dalam politik pendidikan dengan cara mengatur pendidikan dan mengontrol guru.

Hal demikian berdampak pula pada organisasi keagamaan di tahun 1916 sebagai periode pertama, Mathla'ul Anwar (selanjutnya disingkat MA) dengan dinamika dan problematikanya, memiliki sejarah, struktural yang tidak bisa lepas dari pertautan dan pergumulan politik,⁵ politik pendidikan, yang disuguhkan penjajah sangat bertentangan dengan semangat nasionalisme dan nilai-nilai Islam.⁶ Ulama tradisional maupun modern, sufi, elit politik, kaum intelektual, reformis muslim, dan militer bangkit menentang dan melawan para penjajah, untuk menuntut kemerdekaan demi masa depan Indonesia. Respon perlawanan nasionalis terhadap penguasa kolonial Belanda, Steenbrink⁷ menilai bahwa gerakan masyarakat pada waktu itu telah membentuk “gerakan salafi”⁸ dan “gerakan modernis”.⁹

⁵ Faiz Romzi Ahmad, “Mathlaul Anwar Dalam Politik: Apatis Atau Mengikuti Arus?,” *Kompasiana* (Jakarta, 2019), 15.

⁶ Ira Marvin Lapidus, *A History of Islamic Societies* (New York: Cambridge University Press, 2014), 309.

⁷ Karel A Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah : Pendidikan Islam dalam Kurun Modern* (Jakarta: LP3ES, 1991), 31.

⁸ Gerakan dengan mengikuti orang-orang terdahulu yang berkeinginan segera kembali kepada jalan yang telah dibenarkan oleh Allah yakni ulama salaf, sebagaimana gerakan yang telah diproklamirkan oleh Jamaludin al Afgani. Gerakan yang meyakini bahwa Islam adalah agama yang sesuai untuk bangsa, semua zaman dan semua keadaan. Jika ada pertentangan dengan ajaran Islam dengan situasi kondisi yang membawa perubahan zaman dimana kondisi itu harus menyesuaikan sebagaimana yang diperoleh dengan adanya interpretasi baru tentang ajaran-ajaran Islam seperti yang tercantum al Quran dan Hadis. Interpretasi ini diperlukan pintu ijtihad yang terbuka. (lihat Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1996), 54-55

Kedua gerakan tersebut dimanfaatkan oleh sekelompok masyarakat berbasis keagamaan, termasuk MA menerima gagasan kebangkitan komunitas Muslim dalam bentuk gerakan pembaharuan pendidikan Islam, di saat itu pula, MA tetap mempertahankan sistem pendidikan pondok pesantren dengan pendalaman kitab kuning kitab-kitab fikih mazhab Syafi'iyah dan ilmu kalam Asy'ariah yang dipertahankan sebagai kitab-kitab dasar pengetahuan keagamaan dan keislaman.¹⁰

Dalam perjalanannya gerakan ini mengusung semangat nasionalisme untuk melawan penjajah yang telah menghancurkan sistem ideologi negara yang menyebabkan terjadinya konflik dan peperangan antar golongan. Semula gerakan Salafi hanya menjaga jarak dengan sistem negara, ada gerakan yang berorientasi pendidikan memiliki hubungan dengan visi yang dibuat, misi yang dijalankan, program pendidikan yang diselenggarakan, kurikulum yang dipakai, pola kepemimpinan, pengaruh ideologi dan paham keagamaan serta jaringan yang terbangun dengan dunia luar, sampai kepada peran pendidikan

⁹ Gerakan ini sesungguhnya berharap dengan perubahan yang bersifat sosial kultural dan politik ekonomis, bukan hanya jiwa dan ajarannya, akan tetapi mereka masih memelihara tradisi dari ulama-ulama terdahulu. Gerakan ini adalah persatuan untuk umat Islam. Hal ini dikarenakan dunia Islam dipengaruhi oleh Barat, ataupun karena perannya yang menonjol sehingga diperhitungkan dalam kerangka global. Ini adalah tantangan baru Islam dalam kaitannya dengan arus modernisasi di awal abad 20 Islam tengah memainkan perannya dengan mencari wajah baru di era globalisasi dengan mengusung jargon reformasi dan modernisasi. (lihat Streenbrink, *Pesantren Madrasah dan Sekolah*. (Jakarta : LP3S, 1986), 31

¹⁰ Pendalaman kitab-kitab kuning ala pesantren di lembaga pendidikan Mathla'ul Anwar, terutama pesantren-pesantren yang diasuh para kiyai Mathla'ul Anwar antara lain menggunakan kitab-kitab karya KH Mas Abdurrahman, selaku tokoh sentral dalam bidang pendidikan di Mathla'ul Anwar. Adapun kitab-kitab karya KH Mas Abdurrahman yang digunakan pada waktu itu yaitu: Jawaiz Fi Ahkamil Janaiz, Duwa Risalah: Bab Al-Salam fi Arkan al-Iman wa al-Islam & Siqayatu al-'Atsyani fi Tajwidi al-Quran, Nahwu Jamaliyah: Tarjamah atas Matan Ajurumiyah, Sharaf Takhfif, Manzhumat, dan lain-lain.

yang semakin luas (*wider mandate*). Sekalipun politik *divide et impera* (belah bambu), yang senantiasa digencarkan oleh Belanda, menyebabkan terjadinya pertentangan dan sengketa politik antar elit dan pewaris kesultanan yang tak jarang memunculkan peperangan lokal.

Pada tahun 1926, dimulai meletusnya pemberontakan Menes¹¹ yang melibatkan Kiai dan tokoh Masyarakat yang mengatasnamakan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang bertujuan untuk melawan penjajah Belanda sekaligus berdirinya *Nahdlatul Oelama* (NO) pada tahun 1926,¹² yang dilatarbelakangi bahwa para ulama ingin mempersatukan umat Islam, disamping itu ingin memurnikan pemahaman ajaran syari'at Islam dari hal kemusyrikan, sekaligus ingin mengusir penjajah dari bumi

¹¹ Keterlibatan ulamâ` dalam Partai Komunis Indonesia (PKI) telah meningkatkan jumlah pengikut PKI. Terbukti ketika PKI berhasil merekrut Haji Tb. Achmad Chatib, mantan ketua Sarekat Islam Labuan sekaligus menantu K.H. Asnawi Caringin, seorang ulama karismatik di Banten saat itu. Keterlibatannya dalam partai ini memberikan dampak yang signifikan bagi banyaknya peserta partai. Dengan bergabungnya menjadi anggota SI (Tb. Emed) juga ikut PKI . Apalagi, begitu banyak kiai bergabung dengan partai ini, K.H. Muqri Labuan, K.H. Madoen, K.H. Ichyar, K.H. Emed, K.H. Yahya Petir Serang, beserta mereka murid (santri) juga bergabung dengan PKI. Memang, K.H. Abdul Hadi dari Bangko Menes mengambil semua penduduk desa di desanya untuk bergabung dengan pesta ini. Dengan partisipasi banyak orang 'ulamâ` di partai ini, pertemuan partai ini terkadang dilakukan di masjid, musala (langgar), atau pesantren. Lihat : Helmy Faizi Bahrul Ulumi, *Magic and the Communist Revolt of 1926 in Banten: a Study on the Script of K.H. Muqri Labuan*, Kawalu: Journal of Local Culture Vol 5, No. 1 (January - June), 2018

¹² Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia, yang didirikan pada tahun 1926. Latar belakang berdirinya NU terkait dengan situasi sosial dan politik di Indonesia pada masa itu. Pada awal abad ke-20, Indonesia masih berada di bawah penjajahan kolonial Belanda. Pada saat yang sama, gerakan modernis Islam yang menekankan pada reformasi dan pembaruan mulai berkembang di Indonesia. Gerakan modernis ini menyebabkan terjadinya pergeseran dalam pemahaman dan praktik agama Islam di Indonesia. Namun, gerakan modernis ini juga dihadapi oleh kekhawatiran dari kalangan muslim yang lebih tradisional dan konservatif, terutama di Jawa. Mereka khawatir bahwa gerakan modernis tersebut dapat mengancam keutuhan dan kesucian ajaran Islam. Dalam konteks ini, KH. Hasyim Asy'ari, seorang ulama tradisional yang berasal dari Jawa Timur, memainkan peran penting dalam mendirikan NU. Pada awalnya, NU didirikan sebagai sebuah gerakan sosial keagamaan yang bertujuan untuk mempertahankan ajaran Islam yang dianggap lebih tradisional dan konservatif.

pertiwi sebagai bentuk tanggung jawab ulama, kiai di dunia Islam. Setting sosial senantiasa menjadi latar belakang gerbang masuknya ideologi yang coba ditawarkan penjajah, termasuk persoalan agama dan pendidikan, dengan politik etis¹³ (kebijaksanaan),¹⁴ maka seiring dengan urban dan banyaknya para pendatang dengan berbagai macam kepentingan dan ideologi, sehingga pergumulan politik di Indonesia adalah respon politik dibangun untuk kemajuan Indonesia sekalipun dibawah pengawasan Belanda,¹⁵ karena dibentuk oleh kombinasi kontradiktif, yang secara tradisional terbangun atas jaringan dan produksi yang berlebihan.¹⁶ Semakin hebatnya tipuan para penjajah melalui politik etis, maka situasi tersebut menurut Tan, semakin kuatnya stigma yang memposisikan pendidikan Islam sebagai dogma dan indoktrinasi,¹⁷ sehingga konstelasi ini memunculkan pergumulan politik yang memiliki implikasi luas yang tidak hanya mempersoalkan diskursus ideologi agama tetapi juga persoalan pendidikan, terutama persoalan lembaga pendidikan yang ada di daerah khususnya MA, yang sangat rentan dengan indoktrinasi ideologis, namun Azyumardi Azra

¹³ Van deventer seorang ahli hukum negara Belanda yang memperkenalkan politik etis pertama kali, politik balas budi atau disebut juga "*etische politic*" yang memiliki makna politik haluan utama, politik yang berakar pada kemanusiaan sekaligus keuntungan ekonomi, periode ini tergantung pada penaklukan militer Hindia Belanda yang tergabung dalam satu entitas tunggal yang tujuannya adalah modernisasi, mulai dari infrastruktur sampai kepada pendidikan yang dibuka seluas-luasnya. Lihat Adrian Vickers, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta : Insan Madani, 2011), 24

¹⁴ Eko Satriya Hermawan Sumarno, R.N. Bayu Aji, "Ethical Politics and Educated Elites In Indonesian National Movement," in *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 383 (Atlantis Press, 2019), 369–373.

¹⁵ M.C Ricklefs and Moh. Sidik Nugraha, *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008* (Jakarta: Insan Madani, 2018), 12.

¹⁶ Harry Jindrich. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit; Islam Indonesia pada masa pendudukan Jepang*. (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), 38.

¹⁷ Charlene. Tan, *Islamic Education and Indoctrination : The Case in Indonesia* (New York: Routledge, 2014), 2.

tetap menegaskan bahwa bukan indoktrinasi ideologis yang melahirkan radikalisme sebagaimana sentimen teologis yang coba dibangun Afganistan dan Pakistan.¹⁸ Hal ini kemudian diamini oleh Vickers Adrian, adapun kasus di Indonesia, salah satunya madrasah yang saat ini menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional, baik secara yuridis, maupun institusional,¹⁹ yang oleh Azra disebut sebagai proses *mainstreaming* (pengarusutamaan) pendidikan Islam, meskipun secara independen dikelola oleh komunitas Muslim.

Pada masa kolonial, ada banyak pendidikan dibawah organisasi agama sebagai ordonansi sekolah liar,²⁰ yang tidak memperoleh dukungan finansial,²¹ diposisikan sebagai alat bagi perjuangan kemerdekaan, dan menjadikan pendidikan sebagai wadah bagi

¹⁸ Azyumardi Azra, *Tradisi Dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Penerbit Kalimah (Jakarta: Kalimah, 2011), 100.

¹⁹ Vickers Adrian, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Insan Madani, 2011), 24.

²⁰ Pada masa kolonial di Indonesia, pemerintah Belanda menerapkan kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam bidang administrasi, perdagangan, dan industri. Namun, akses pendidikan formal pada masa itu sangat terbatas dan tidak merata, sehingga banyak orang yang tidak bisa mengakses pendidikan formal. Untuk mengatasi masalah ini, banyak masyarakat Indonesia pada masa itu mendirikan sekolah-sekolah alternatif yang dikenal sebagai "sekolah liar". Sekolah-sekolah ini biasanya didirikan oleh tokoh-tokoh masyarakat, guru swasta, atau organisasi-organisasi keagamaan sebagai alternatif bagi pendidikan formal yang tidak terjangkau. Namun, pada tahun 1932, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan sebuah ordonansi yang melarang berdirinya sekolah-sekolah liar. Ordinanasi ini ditujukan untuk menekan gerakan nasionalis di Indonesia yang dipandang sebagai ancaman bagi kepentingan kolonial. Pemerintah kolonial Belanda berpendapat bahwa sekolah-sekolah liar tidak memberikan pendidikan yang berkualitas dan cenderung menghasilkan generasi yang tidak terdidik. Akibat ordonansi ini, banyak sekolah-sekolah liar yang dibubarkan dan beberapa di antaranya bergabung dengan sekolah-sekolah formal yang telah ada. Namun, sekolah-sekolah alternatif tetap eksis dan berkembang di masyarakat Indonesia, terutama pada masa pendudukan Jepang dan setelah kemerdekaan Indonesia. Sekolah-sekolah alternatif ini masih ada hingga sekarang dan dikenal sebagai "sekolah swasta" atau "sekolah keagamaan".

²¹ Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*. (Jakarta: LP3ES, 1985), 12.

pergerakan rakyat menentang kolonialisme.²² Hal ini yang mendorong kekuatan perjuangan MA untuk meningkatkan standar mutu pendidikan Islam di masyarakat melalui pendirian madrasah.²³ Madrasah sebagai pendidikan Islam modern di Banten yang diperkenalkan oleh MA melalui sistem kelas dengan membuka Sembilan kelas, belajar untuk Sembilan tahun masa sekolah, sehingga dalam kongres pertama MA pada tahun 1936 ada sekitar 40 madrasah di tujuh cabang yang tersebar di wilayah Jawa Barat dan Lampung.²⁴

Di tahun 1950an, MA melanjutkan peningkatan mutu pendidikan dengan mengadopsi sebagian sistem baru yang diperkenalkan pemerintah termasuk pembelajaran sekuler, sehingga mengakibatkan tujuan pendidikan MA secara bertahap kehilangan mutu lulusan yang mencetak ulama yang berwawasan ilmu keislaman, dengan sendirinya pemimpin MA lebih cenderung mengikuti organisasi Islam lainnya ketimbang membangun organisasi MA, hal inilah ada kecenderungan menempatkan MA memberikan ruang terjadinya perbedaan sikap politik internal seiring dengan terjadinya perpecahan politik antar organisasi Islam di Indonesia. Pada 1952, muktamar NU di Palembang yang menghasilkan keputusan untuk membuat partai politik yang terpisah dari Masyumi.²⁵

²² KH Embay Mulya Syarief, "Pendidikan Dalam Arah Baru Mathla'ul Anwar," *Tempat Terbitnya Cahaya MA*, 2021, <https://mathlaulanwar.or.id/2021/10/04/pendidikan-dalam-arah-baru-mathlaul-anwar/>.

²³ Nurul Rosidin Didin, *Membela Islam Mathla'ul Anwar Di Tengah Arus Perubahan Agama, Sosial Dan Budaya Politik Di Indonesia* (Cirebon: CV. Elsi Pro, 2018), 18.

²⁴ Sekretariat Pengurus PB MA, *Sejarah Ringkas Berdirinya MA Dan Perkembangannya* (Jakarta, n.d.),4.

²⁵ Didin Nurul Rosidin, *Madrasah and Politics in 1950s: A Study of the Rise of New Madrasah in Menes of Banten* (Australia: ANU, n.d.),1-29.

Hal demikian membuat sikap tak pasti Uwes Abu Bakar mengusik sejumlah pemimpin muda MA yang dipimpin oleh ketiga putra Mas Abdurrahman, yaitu Kholid, Muslim dan Nahid Abdurrahman. Mereka mendesak pemimpin umum sekembalinya dari Lampung untuk menjadikan MA mandiri secara politik. Mereka berpendapat bahwa sejak NU menjadi partai politik seperti Masyumi, Perti dan lainnya, maka NU tidak bisa lagi dianggap sebagai organisasi yang murni sosial dan agama. Mereka kemudian menyatakan bahwa MA sejak dari awal adalah organisasi yang murni sosial dan agama yang tidak akan terlibat dalam bentuk politik praktis apa pun.²⁶

Perpecahan ini memuncak pada Mukhtamar VIII MA di Ciampea pada Juli 1952, Pemilihan tempat ini menjadi isyarat kuat untuk meredam dan menunjukkan bahwa Uwes Abu Bakar tampaknya berpihak pada arah yang didukung oleh para pemimpin muda sebelumnya,²⁷ yakni bahwa MA harus dipusatkan pada proyek kemajuan pendidikan dan tetap bebas dari keterkaitan politik.

Pada tahun 1970, terlihat perpecahan di internal MA akibat perbedaan pemikiran keagamaan, sehingga gagasan baru selalu bertentangan dengan secara tradisional ditambah adanya ketegangan politik, munculnya kelompok puritan dengan corak keagamaan, seiring karena meninggalnya ketua umum, Uwes Abubakar, sampai kepada aktivitas pengiriman kader-kader, terutama para alumni madrasah MA

²⁶ Didin, *Membela Islam Mathla'ul Anwar Di Tengah Arus Perubahan Agama, Sosial Dan Budaya Politik Di Indonesia*, 94–95.

²⁷ Didin, *Membela Islam Mathla'ul Anwar Di Tengah Arus Perubahan Agama, Sosial Dan Budaya Politik Di Indonesia*, 96.

pusat Menes makin gencar dilakukan pada masa kepemimpinan Uwes Aboebakar.²⁸

Pada masa ini MA berada pada posisi perselisihan pandangan politik yang telah membawa perpecahan secara kelembagaan yang tidak menguntungkan lantaran ada empat madrasah baru yang didirikan oleh mantan guru MA sekaligus kader yang militan,²⁹ yang kemudian mengambil alih kepemimpinan dengan cara membawa MA berposisi dengan penguasa Orba.³⁰ Karena tekanan eksternal yang hebat dan juga masih kuatnya perselisihan internal, organisasi ini mengalami kemunduran. Keadaan yang tidak menguntungkan ini mendorong para pemimpin yang lebih akomodatif secara politik untuk mengambil alih kepemimpinan secara paksa dan membawa MA sejalan dengan arah politik pemerintah Orde Baru.

Selain politik, MA juga menghadapi sumber perselisihan internal lainnya, yakni pembaharuan atau bisa dikatakan sekularisasi sistem sekolah Islam. Masuknya sejumlah pelajaran umum memicu kemarahan yang meluas di kalangan para guru senior.³¹ Karena pengurus pusat

²⁸ Didin, *Membela Islam Mathla'ul Anwar di Tengah Arus Perubahan Agama, Sosial dan Budaya Politik Di Indonesia*, 19.

²⁹ MA organisasi non-politik dan karenanya harus keluar dari hubungan afiliasi dengan NU yang telah berlangsung sejak tahun 1928. Sementara itu, kelompok tua berupaya untuk mempertahankan hubungan dengan NU, termasuk dengan mendukung partai NU yang baru dibentuk. Ketika Mathla'ul Anwar lewat Muktamarnya tahun 1952 memutuskan untuk memilih opsi yang pertama, perpecahan internal pun tidak bisa terelakkan. Kelompok kedua kemudian memilih untuk memisahkan diri dan mendirikan madrasah baru yang diberi nama Al-Ma'arif dan Anwarul Hidayah. Bahkan pada tahun 1960-an dan 1970-an, muncul dua madrasah baru lainnya yaitu Mathla'ul Anwar Li Nahdhatil Ulama atau Malnu dan Nurul Amal. Lihat. Didin Rosidin, *Madrasah and Politics in 1950s: A Study of the Rise of New Madrasah in Menes of Banten, Australia*, tt), 1-2,

³⁰ Didin, *Membela Islam Mathla'ul Anwar Di Tengah Arus Perubahan Agama, Sosial Dan Budaya Politik Di Indonesia*, 19.

³¹ Didin, *Membela Islam Mathla'ul Anwar Di Tengah Arus Perubahan Agama, Sosial Dan Budaya Politik Di Indonesia*, 138.

menolak meninggalkan gagasan ini, kelompok yang berseberangan ini menciptakan kekisruhan di dalam organisasi. MA pada masa periode ini masuk dua periode penting. Periode pertama, dua puluh tahun pertama kekuasaan Orde Baru ditandai dengan adanya sikap oposisi yang kuat dari MA terhadap penguasa, datang dari kepemimpinan pusat berada di bawah kendali para pemimpin radikal, yang seringkali menentang pemerintahan Orde Baru. Periode kedua, selama tahun-tahun terakhir pemerintahan Soeharto, MA mengambil pendekatan politik yang lebih akomodatif setelah para pemimpin moderat dan pragmatis secara politik mengambil alih kekuasaan kepemimpinan pusat organisasi ini.

Dari segi pendidikan MA setelah Muktamar XIV 1985, berada pada posisi yang sangat menguntungkan dalam perkembangannya apalagi posisi Irsyad Djuwaeli sangat berpengaruh, sampai ke berbagai daerah mendirikan cabang-cabang madrasah MA.³² Selama mendukung Golkar, MA maju berkembang sehingga cabang-cabang dari MALNU hilang seiring dengan konstelasi politik. MA maju dalam pendidikan mengikuti alur politik pemerintah dengan tetap menjaga marwah dan khittah MA sekalipun persoalan politik internal selalu ada.

Pada tahun 1999, di era reformasi ini MA menegaskan kembali perjuangannya dalam bidang pendidikan, dakwah dan sosial sebagai sebuah gerakan ke arah peningkatan mutu dan kualitas kehidupan bangsa. Dalam hal ini MA mendesak pemerintah untuk mengubah UU Pendidikan nasional agar tidak diskriminatif dalam pembiayaan pendidikan antara sekolah-sekolah swasta dan negeri, mendesak pemerintah untuk mengubah kurikulum pendidikan yang

³² Iin Solihin, "Mathla'ul Anwar Dalam Konstelasi Politik Nasional Pasca Orde Baru" (UIN Jakarta, 2010),61.

memungkinkan madrasah agar tetap berfungsi sebagai lembaga pendidikan nasional, serta menambah jam pelajaran materi pendidikan agama di sekolah-sekolah umum menjadi 6 jam pelajaran di tingkat SD dan 4 pelajaran di tingkat SLTP dan SLTA, Mathla'ul Anwar juga memperjuangkan otonomi pendidikan.³³

Kondisi di atas menunjukkan bahwa pandangan politik yang berbeda dan perpecahan internal bukan penghalang dalam mengembangkan institusi pendidikan, termasuk MA, karena perlu dicatat bahwa Masyarakat Islam di Banten lebih dominan dalam memilih lembaga pendidikan di bawah Ormas atau gerakan keagamaan. Karena bagi MA kelompok keagamaan yang semakin kuat dengan ideologi dan identitas politik pendidikannya, maka akan terlihat dinamika pemikiran dan perkembangan organisasinya. Dengan demikian sangatlah wajar yang terjadi pada MA, munculnya Mathlaul Anwar Li Nahdlatil Ulama (MALNU), Anwarul Hidayah, dan Ahlussunnah wal Jamaah sebagai bagian dari organisasi keagamaan yang terlahir atas dasar egosekterian.

Berdasarkan latar belakang di atas, bahwa pergumulan politik dengan berbagai kepentingan antar kelompok keagamaan, baik pengaruh dari kebijakan politik pada masa sebelum kemerdekaan ataupun politik pendidikan ketika dan setelah kemerdekaan yang menjadi ijtihad dari kelompok keagamaan lokal yang bermetamorfosis ke dalam diskursus agama dan pendidikan yang mengemuka, maka secara ideologis, yang kemudian menjadi isu besar dalam memayungi proses yang spesifik dan

³³ Dona el Furqon, "Mathlaul Anwar Gelar Mukhtamar XVIII Dengan Peringatan Ulang Tahun Ke 94," *Serang. Pelita*, last modified 2013, <https://mediaopsikudus.blogspot.com/2010/07/mathlaul-anwar-gelar-mukhtamar-xvii.html>.

sistematis terkhusus berkaitan dengan agama dan pendidikan Islam di Mathla'ul Anwar. Oleh karena itu dalam konteks keberagaman yang dibangun atas dasar pemikiran dan kepentingan yang berbeda, ideologi yang dianut namun corak dan muatannya sama dengan sistem pendidikan yang berlabel dan identitas nilai-nilai Islam, maka penelitian sangat perlu dilakukan dan peneliti mengangkat judul disertasi "Pergumulan Politik dan Dampaknya terhadap Pendidikan Mathla'ul Anwar".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, banyak sekali memunculkan beberapa pertanyaan, yang dapat diidentifikasi di antaranya:

1. Agama masih dijadikan sebagai alat atau politik kekuasaan di Banten
2. Pendidikan Islam belum sepenuhnya diimplementasikan oleh masyarakat khususnya di Banten
3. Masyarakat masih memahami otonomi pendidikan secara keliru, sebagai bentuk liberalisasi khususnya pendidikan di Banten
4. Ideologi keagamaan yang berafiliasi dengan partai politik tertentu
5. Konflik antar golongan masih kentara karena persoalan pemahaman agama
6. Menguatnya rivalitas ideologis internal antar kelompok keagamaan khususnya di Mathla'ul Anwar

C. Batasan Masalah

Dari rumusan masalah di atas, penelitian ini difokuskan kepada persoalan ideologi agama dan pendidikan Islam sehingga menjadi diskursus dan pergumulan politik di tubuh MA yang dijabarkan pada penelitian disertasi ini, karena di awal disebutkan bahwa dokumen dan data yang terkait dengan pendidikan dan keagamaan MA merupakan sumber primer. Oleh karena itu tidak semua ideologi pendidikan dan keagamaan selain menjadi diskursus dan tema penting di MA untuk dianalisis, akan tetapi penelitian ini hanya fokus pada kajian dalam disertasi yang menekankan pada studi lapangan (*field research*) melalui *historical research* yang dikuatkan dengan data dokumentasi yang ada kaitannya dengan persoalan kebijakan pendidikan, kontestasi ideologi keagamaan dan politik internal yang berdampak terhadap pendidikan yang menghasilkan ciri khas dan model pendidikan Islam di MA.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bermaksud mengkaji dinamika kontestasi ideologi dan kepentingan internal organisasi terhadap dinamika tersebut dalam konteks perkembangan pendidikan sehingga menjadi pergumulan yang menjadi ranah kepentingan (politik) sehingga berimplikasi dan dampaknya terhadap pendidikan MA, maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pendidikan pemerintah berdampak terhadap pendidikan Islam di MA?
2. Bagaimana kontestasi ideologi keagamaan berdampak terhadap pendidikan Islam di MA dalam mengembangkan lembaga pendidikan?

3. Bagaimana dinamika politik internal berdampak terhadap pendidikan Islam di MA ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui sekaligus menganalisis pergumulan politik melalui kebijakan pemerintah dan dinamika politik internal dengan pemikiran keagamaan pada tataran ideologi keagamaan yang berdampak terhadap pendidikan Islam MA yang akan dijadikan pembahasan lebih fokus dan mendalam, di antaranya meliputi:

1. Kebijakan pendidikan pemerintah berdampak terhadap pendidikan Islam di MA.
2. Kontestasi ideologi keagamaan berdampak terhadap pendidikan Islam di MA dalam mengembangkan lembaga pendidikan.
3. Dinamika politik internal berdampak terhadap pendidikan Islam di MA.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan untuk :

1. Mendapatkan penjabaran tentang pemaknaan dari informasi ilmiah mengenai substansi dan eksistensi MA sebagai ormas terbesar di Banten
2. Perluasan wawasan nilai akademis sekitar politik yang ada di MA terkait dengan ideologi, agama dan dunia pendidikan, serta mengenai kedudukan fungsi strategis pendidikan Islam pada lembaga pendidikan Islam di masa depan

3. Dapat memberi manfaat yang membuat langkah-langkah untuk mendorong sekaligus muncul dan tumbuh kembangnya pendidikan Islam baik secara agama maupun ideologis
4. Dapat memberi nilai lebih terhadap perluasan kepastakaan dan untuk kepentingan penelitian tindak lanjut melalui ideologi, agama dan pendidikan di tubuh MA sebagai Ormas Islam.

Tantangan normatif yang menjadi tuntutan aplikatif MA, pada dasarnya bukan sekedar ada, tetapi justru yang mendasar adalah Umat Islam dengan keislamannya dalam realitas sosial tidak bisa lepas dari gempuran modernisasi yang semakin cepat dari pendidikan yang dilakukan secara sosial-teknologi, ditransformasikan secara *internal-normatif* dan *eksternal-sosio-historis-teknologi*, yang memiliki makna dan pentingnya riset.³⁴

Secara substansial, lembaga pendidikan Islam memberi isyarat bagaimana potensi manusia bertransformasi kepada tuntutan agar potensi tersebut dapat diwujudkan dan dikembangkan untuk kepentingan manusia. Secara prospektif lembaga pendidikan Islam ke depan melalui ideologi, agama, dan dakwah tentu saja dengan perubahan sosial yang ada, secara kultural didorong oleh akselerasi dengan teknologi komunikasi yang semakin berkembang cepat, melahirkan masyarakat yang mampu bersaing apalagi memasuki revolusi industri *society 5.0*, mewujudkan menjadi "mega kompetisi", yang menuntut kualitas moral, secara fisik-intelektual lembaga pendidikan MA dapat mengkomunikasikan secara virtual dalam dunia global.

³⁴ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran.*, Edisi Keem. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 19.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sekaligus memperkaya khazanah keilmuan terkait dengan keagamaan dan pendidikan Islam yang ditawarkan oleh MA sekaligus mampu menghadirkan gagasan penguatan karakter keabadian yang dimiliki MA yakni agama dan pendidikan Islam sebagai ideologi dan gerakan kulturalnya.

G. Kerangka Pikir

Dalam penelitian disertasi ini seputar kekuatan politik pendidikan di tubuh MA, dengan kajian yang lebih menitikberatkan ideologi keagamaan, organisasi keagamaan MA yang memunculkan corak keagamaan dan perkembangan dan dampaknya terhadap pendidikan yang ada di MA. Pembahasan teori tentang politik pendidikan dan ideologi sesungguhnya sulit dipisahkan, lantaran keduanya sangat memerlukan keberlangsungan hidup terutama dalam arus budaya, meminjam bahasa Stafford dan Branston, bahwa ideologi merupakan keberlangsungan yang diwujudkan dalam bentuk hegemoni, bahwa akal sehat dan perasaan menyatu bersama sebagai bagian dari ideologi, yang dikonsepsikan dalam bentuk dominan dan eksistensi fisik berupa material tradisi dan budaya.³⁵ Dua material ini yang coba dibangun oleh MA sebagai media dalam mengantarkan dakwah untuk mencapai tujuan Islam sebagai agama dan pendidikan Islam.

Dalam pandangan Islam, sesungguhnya politik hanya sekedar media atau perantara untuk tujuan dakwah, juga bukan sebaliknya, dakwah justru dijadikan media dan sarana untuk tujuan berpolitik.

³⁵ Gill and Roy Stafford Branston, “‘Ideologies and Power’,” in *The Media Student's Book.*, (third edi. (London: Routledge, 2013), 98.

Sekalipun menurut John L. Esposito, Islam sebagai politik berakar pada kebangkitan agama kontemporer, dalam kehidupan pribadi dan sosial.³⁶ Banyak muslim menjadi lebih taat terhadap praktik keimanan di satu sisi, namun di sisi lain Islam muncul sebagai alternatif dari anggapan kegagalan ideologi sekuler seperti nasionalisme, kapitalisme dan sosialisme.

Sejak tahun 1980-an dan 1990-an muslim mayoritas pada kelas menengah mempunyai ciri khas yang berbeda dari generasi muslim sebelumnya.³⁷ Keagamaan dan pendidikan yang menjadi ideologi organisasi khususnya MA menjadi tradisi yang kuat dan melekat untuk memperkuat rasa percaya diri, memiliki daya beli sangat tinggi, semakin tinggi dan berkembang pesatnya di daerah perkotaan khususnya di Banten.

MA dengan menawarkan ideologi keagamaan mampu menjabarkan nilai-nilai keadaban yang bercorak pada Islam yang mensinergikan kekuatan spiritual emosional dan intelektual kepada kehidupan nyata, karena dalam doktrin Islam, sesungguhnya sesuatu yang telah dan akan harus dilakukan secara nyata melalui proses-proses yang baik dan benar.

Ideologi keagamaan dan pendidikan sebagai penetrasi perkembangan terakhir untuk melihat bagaimana Islam dan Barat yang saling berbenturan antara satu sama lain, karena orientasi ideologis mana pun bisa dibicarakan, seperti muslim paling sekuler karena masyarakat semakin terpaut dengan kekosongan moral, sehingga

³⁶ L Esposito John, *Masa Depan Islam : Antara Tantangan Kemajemukan Dan Benturan Dengan Barat* (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), 134.

³⁷ Syarjaya, *Dirosah Islamiyah I; Sejarah dan Khittah Mathlau'ul Anwar*, 56.

menempatkan keduanya dalam sebuah pertarungan diskursif yang tidak terlepas dari kekuasaan dan ideologi tertentu.

Krisis yang begitu akut bagi individu merupakan produk zaman modern, atau mungkin karena kebangkitan kapitalisme yang tak terhindarkan, urbanisasi tanpa batas, dan ledakan informasi dan teknologi membuka jalan bagi dunia yang sangat berbeda, yang membutuhkan fleksibilitas dan penyesuaian.³⁸ Upaya yang dilakukan MA dalam membatasi kebebasan ini tidak lain adalah tren sosial politik yang melampaui batas-batas budaya.

Tujuan didirikannya lembaga sebagai identitas dengan standar moral dan tanggung jawab yang tinggi dapat mengikis sifat individualistis karena kurangnya koherensi budaya, yang dapat merespons krisis budaya ini dalam mendukung nilai-nilai dan kepercayaan yang dapat menghancurkan peradaban tertentu. Bagi Farchan, koherensi adalah kunci harapan untuk tujuan hidup organisasi yang terkelola, yang dapat menjaga identitas lebih jelas sebagai fakta dasar tentang perkembangan manusia dan modalitas sosial yang dapat berinteraksi dalam hubungan masyarakat sebagai kepemilikan budaya untuk ditampilkan melalui unsur budaya.³⁹ Dilihat dari unsur-unsur kebudayaan, masing-masing unsur tersebut pasti berbeda tingkat perkembangan dan perubahannya.

Keterkaitan organisasi dengan budaya merupakan kunci utama dalam rangkaian hidup organisasi yang dapat dikelola, sehingga terdapat fakta-fakta yang mendasar tentang pembangunan manusia dan modalitas

³⁸ J. P. Domínguez, "Introduction: Religious Toleration in the Age of Enlightenment.," *History of European Ideas* 43, no. 4 (2017): 273–287.

³⁹ Y. Farchan, "Reasoning of Liberal Islam: A Study on Islamic Perspectives in Liberal Islam Network Jakarta.," *Analisa*, 1, no. 2 (2016): 180–198.

sosial yang diasumsikan dalam hubungan budaya termasuk MA, organisasi yang memiliki kebudayaan tersendiri yang diungkapkan melalui komponen kebudayaan.⁴⁰ Dilihat dari komponennya masing-masing komponen tersebut dapat dipastikan mengalami perubahan pada tingkat perkembangan. Sekalipun identitas menjadi tolok ukur ideologi dari sebuah lembaga yang dikembangkan termasuk lembaga pendidikan.

Relevan dengan hasil studi Arief Subhan yang cukup representatif, terkait dengan ideologi keagamaan dan pendidikan Islam, dikatakan bahwa strategi untuk mempertahankan identitas berupa ideologi agama sudah terjadi sejak lama selama abad ke-20, seperti lembaga pendidikan di bawah naungan Muhammadiyah, Nahdlatul 'Ulama, dan Manhaj Salafi, meski sudah lama melakukan modernisasi, sekalipun dalam intensitas yang berbeda tapi tidak mau kehilangan identitasnya.⁴¹ Sedangkan MA dengan identitas keberagaman keagamaan, baik yang tradisionalis, reformis maupun fundamentalis mampu menghadirkan sikap pemikiran yang beragam pula, meskipun perselisihan internal terjadi sebagaimana perjalanan sejarah dan diskursus ideologi yang menyentuh ranah politik MA yang berakibat atau dampak terhadap pendidikan di MA.

Menurut Aan, bahwa kunci penguatan identitas dan nasionalisme bangsa tersebut terletak dan ada pada pendidikan. Berkaca pada Negara China, Jepang, dan Korea Selatan.⁴² Lebih lanjut ketiga negara tersebut

⁴⁰ Ahmad, *Jejak Keilmuan Dan Corak Pemikiran Keagamaan Kh Mas Abdurrahman Bin Jamal Al-Janakawi*, 9.

⁴¹ Suharto Toto, "Gagasan Pendidikan Muhammadiyah dan NU sebagai Potret Pendidikan Islam Moderat di Indonesia," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 1 (2016): 81–109.

⁴² Aan and Rukmana dan Edi Lembong, *Penyerbukan Silang Antarbudaya, Membangun Manusia Indonesia* (Jakarta: Elekmedia Komputindo, 2015), 272–282.

termasuk dan tergolong negara maju, yang tidak lepas identitas dan budaya nasionalnya, bahkan identitas serta budaya nasional negara tersebut justru harus diekspor ke luar, sehingga Mahnan Marbawi⁴³ dalam penelitiannya berpendapat bahwa China hanya butuh waktu tiga puluh tahun bagi negara maju untuk bersaing dengan Amerika. Butuh waktu empat puluh tahun bagi Jepang untuk menjadi negara maju yang diperhitungkan oleh dunia. Negara maju dengan tidak meninggalkan jati diri dan nasionalismenya.⁴⁴ Hal demikian berbeda dengan negara di Finlandia, kebijakan pendidikan yang tidak terpengaruh oleh politik penguasa.

Dengan adanya diseminasi ideologi keagamaan dan pendidikan, otonomi salah satu jalan arah tujuan dari dikotomi pendidikan, seperti sekolah negeri atau sekuler dengan madrasah sebagaimana sekolah swasta telah mencirikan diri sebagai sekolah agama, seperti sekolah Katolik dan Muhammadiyah. Madrasah atau sekolah yang ditawarkan oleh MA berafiliasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena menggunakan kurikulum yang dipersyaratkan. Namun, mereka menggunakan kurikulum lain (formal atau non formal) yang sengaja dirancang untuk menjaga komitmen keagamaan dan menginternalisasi nilai-nilai agama dalam diri siswa.

Menurut Moh Yamin, dengan mengintegrasikan mata pelajaran agama sebagai pelajaran tambahan ke dalam kurikulum Kemendikbud, yang dirancang untuk mengatur kegiatan yang dilakukan siswa dalam

⁴³ M Marbawi, *Ideologi Pendidikan Studi Penguatan Pancasila Pasca Orde Baru Melalui Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, Repository.Uinjkt.Ac.Id, 2019, [http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48851/1/Mahnan Marbawi.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48851/1/Mahnan%20Marbawi.pdf).

⁴⁴ M Marbawi, *Ideologi Pendidikan Studi Penguatan Pancasila Pasca Orde Baru Melalui Pendidikan Agama Islam Di Sekolah*, 92.

rangka menumbuhkan keyakinan dan nilai-nilai agama di dalamnya,⁴⁵ maka di beberapa kasus, sekolah atau madrasah mungkin menjadi lebih religius karena ideologi yang mereka bangun daripada sekolah-sekolah di bawah kementerian agama, atas dasar diseminasi ideologi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Bahkan ideologi ini dapat melahirkan model struktur keilmuan baru dalam setiap sistem yang digunakan, termasuk pendidikan.⁴⁶ Kemampuan MA untuk memperoleh teori-teori yang valid dan didukung oleh struktur ilmiah yang valid membuat ideologi kapitalis memiliki sifat yang tidak fana.

Ideologi agama dan Pancasila sesungguhnya digali berasaskan berbagai ide dan khazanah budaya, sejarah bangsa Indonesia yang sudah lama di dalamnya terkandung nilai-nilai dan ajaran agama, tentu saja ideologi pancasila masih aktual dan relevan dengan kehidupan masa kini dan masa depan.⁴⁷ Padahal keberadaan lembaga-lembaga tersebut memiliki tujuan yang sama, persaingan dengan dakwah masih menjadi senjata andalan dalam menghadirkan pendidikan yang sejati, tidak sedikit dari lembaga-lembaga tersebut memiliki visi misi yang dapat mempengaruhi masyarakat, tentunya kelebihan dan keunggulan dalam perspektif pengelola lembaga atau lembaga itu sendiri secara terus menerus dengan mempertahankan brand dan jargon yang dimiliki lembaga tersebut.

⁴⁵ Moh, Yamin, *Ideologi Dan Kebijakan Pendidikan* ((Malang: Madani, 2013), 11.

⁴⁶ Toto Suharto, "Transnational Islamic Education in Indonesia: An Ideological Perspective," *Contemporary Islam* 12, no. 2 (2018): 101–122, <https://doi.org/10.1007/s11562-017-0409-3>.

⁴⁷ Subhan Hi Ali; Doli Witro Dodego, "Moderasi Islam Sebagai Solusi Menangkal Gerakan Radikalisme Dan Ekstrimisme Agama Di Indonesia," *Dialog* 43, no. 2 (2020): 199–207.

Sosok pengelola lembaga khususnya kiai di pesantren atau madrasah tampil sebagai kaum intelektual yang mengamalkan akhlak, bahkan seringkali mereka mengemban dan mengamalkan, apalagi tampil karismatik, berwibawa dan arif, serta mengakomodir nilai-nilai budaya lokal, selain bersikap moderat, pluralis dan inklusif, serta selalu menjunjung tinggi nilai dan cita-cita luhur.⁴⁸

Dalam konteks seperti ini, maka diperlukan strategi budaya untuk menguatkan ideologi agama melalui pendidikan Islam. Strategi budaya yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan oleh MA dalam menguatkan ideologi agama dan pendidikan sesuai kondisi dan perkembangan teknologi informasi dan perkembangan masyarakat serta kondisi peserta didik. Disini ditekankan bahwa bagaimana nilai-nilai agama menjadi salah satu “nalar berpikir dan nalar nilai” yang digunakan dalam pendidikan Agama Islam selain nalar agama.

Hal ini yang menjadi dasar dan prinsip bagi lembaga pendidikan Islam. Begitu juga dengan penelitian ini, dalam mencari jawaban yang lebih lengkap tentang Islam di Indonesia dengan menjadikan lembaga pendidikan Islam MA sebagai fokus perhatian dan objek penelitian dari perdebatan akademik melalui perselisihan internal yang bergumul berdasarkan perbedaan corak dan kecenderungan pemikiran keagamaan, maka muncullah lokus kajian pergumulan politik dan dampaknya terhadap pendidikan MA.

⁴⁸ Anwar Ali, *Pembaruan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 172.

H. Preview Research

Berdasarkan hasil penelitian tentang diskursus keagamaan dalam pendidikan tentu saja memiliki relevansi dengan penelitian ini, sebagaimana akan dijelaskan, dengan memperhatikan dua kecenderungan dalam kajian-kajian yang akan diteliti. Pertama, kajian penelitian tersebut kaitan dengan dinamika institusi dan identitas pendidikan yang hubungannya dengan kepentingan negara. Kedua, fenomena sosial dan institusional dapat dijelaskan, melalui model sosialisasi, ideologi dan hegemoni, tanpa keterlibatan secara eksplisit dengan isu-isu representasi tersebut,⁴⁹ maka sulit dijelaskan bagaimana mengkaji dan respon institusi melalui diskursus pendidikan dalam mempertahankan identitasnya di tengah tuntutan demokrasi, sekularisasi, modernisasi dan globalisasi, sedangkan di tingkat lokal menunjukkan kajian seputar gerakan keagamaan yang bertransformasi dengan tradisi dan budaya lokal.

Penelitian sebagaimana yang ditulis oleh Didin Rosidin⁵⁰, MA berdiri sejak tahun 1916, sudah mengoperasikan madrasah dengan sistem modern. Dua dekade setelah berdirinya, madrasah telah tersebar di luar Menes, tempat madrasah pertama didirikan. Penelitian tersebut memfokuskan MA memainkan peran yang sangat penting dalam membangun pemahaman agama dan orientasi politik bagi anggota dan pendukungnya. Penelitian lain seperti Jihadudin, lebih memfokuskan pendidikan keagamaan dan pengetahuan umum disesuaikan dengan amanat pemerintah melalui pendidikan nasional merupakan khittah MA

⁴⁹ Rebecca and Rogers, *Introduction to Critical Discourse Analysis in Education*, 2014, 1.

⁵⁰ Didin Nurul Rosidin, ““From Kampung to Kota: A Study of the Transformation of Mathla’ul Anwar 1916-1998.” (Disertasi Leiden Belanda, 2007).

yang memproduksi nilai-nilai dasar yang akan menjadi acuan pelaksanaan pendidikan di lingkungan MA, sedangkan penelitian Uwes Abu Bakar⁵¹, yang menguraikan cukup panjang tentang corak pemahaman Islam Ahlussunnah wal-jamaah, melalui mazhab yang dianutnya, dan menjadi panutan keagamaan MA dan menjadi salah satu ideologi keagamaan MA dalam mempraktikkan kehidupan sosial dan keagamaannya serta sebagian terbesar umat Islam di Nusantara.

Penelitian lain, yang ditulis oleh Ahmad Huriyudin,⁵² lebih banyak menganalisis pemikiran KH. Mas Abdurahman yang telah mampu membawa pengaruh besar lembaga pendidikan MA, termasuk adanya pesantren dan madrasah yang tidak terlepas dari motivasi ideologis-teologis, karena nama MA menjadi *trade mark* bagi nama pesantren dan madrasah, masih Huriyudin dkk,⁵³ dalam penelitiannya membahas sejarah gerakan-gerakan terkait dengan modernisasi pendidikan Islam yang banyak dipengaruhi kolonialisme di satu sisi, dan pengaruh geneologi intelektual Timur Tengah di sisi lain. Kondisi ini berdampak pada dualisme sistem pendidikan, dan dua orientasi agama Islam, posisi MA mewujudkan dualisme dalam bentuk madrasah dan sekolah.

Penelitian lain yang terbaru, ditulis oleh Maddais⁵⁴ lebih banyak menganalisis perkembangan pendidikan Islam dari zaman klasik, abad pertengahan dan modern, hingga kontemporer. Selain dialektika antar dimensi sosial-politik dan teologi dengan penyebaran ritme pendidikan

⁵¹ Uwes Abu Bakar, *Ishlāchul Ummah Dalam Menerangkan Arti Ahlussunnah Wal Jama'ah*, ed. Jihaduddin, Cetakan Ke. (Jakarta: PB Mathlaul Anwar, 2016).

⁵² Ahmad Huriyudin, *Jejak Keilmuan Dan Corak Pemikiran Keagamaan Kh Mas Abdurrahman Bin Jamal Al-Janakawi*, 19.

⁵³ Ahmad Huriyudin, dkk., *Mathlaul Dalam Perspektif Sejarah Gerakan Islam Di Indonesia*, 29.

⁵⁴ Maddais, "Modernisasi Pendidikan Islam (Studi Pemikiran K.H. Mas Abdurrahman Tentang Pendidikan Madrasah dan Praksisnya) i."

Islam, berbagai jenis lembaga pendidikan juga disajikan, Ki Mas Abdurahman berhasil membawa pendidikan Islam lebih modern dan dijadikan sebagai sistem pendidikan Nasional. Yang lebih terbaru lagi penelitian yang ditulis oleh Ahmad Rofiq,⁵⁵ lebih banyak menyoroti fenomena ide-ide perubahan sosial dan gerakan keagamaan Mathla'ul Anwar yang dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik waktu itu. Dalam proses perubahan sosial kaum muslimin Indonesia selama satu abad lebih, sejak masa Kolonial, Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi, tentu ada pemikiran yang melandasi gerakan dalam menentukan pergeseran orientasi gerakannya dari masa ke masa.

Dari beberapa penelitian tersebut di atas, secara umum memfokuskan pada sejarah, dinamika, pengaruh organisasi keagamaan, baik terhadap lembaga, organisasi keagamaan itu sendiri, atau terhadap sistem pendidikan yang dikembangkan. Organisasi keagamaan tersebut lebih banyak pula menyoroti aktivitas keagamaan, mengubah proses kehidupan sosial keagamaan, yang semacam ini, biasanya ditandai dengan aksi kolektif yang dilakukan baik oleh organisasi keagamaan maupun lembaga pendidikan, baik terafiliasi dengan partai atau tidak terafiliasi oleh apapun.

I. Kebaruan (*Novelty*)

Kebaruan penelitian disertasi ini dapat dipetakan berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan ideologi keagamaan, organisasi keagamaan, lembaga pendidikan agama Islam dan seputar ideologi organisasi keagamaan khususnya MA, sehingga

⁵⁵ Rofiq, "Dinamika Pemikiran dan Gerakan Keagamaan Mathla'ul Anwar 1916-2023. i"

penelitian disertasi ini, oleh penulis dipetakan melalui fenomena politik yang terjadi, bentukan organisasi MA, kemudian fenomena pendidikan dengan kurikulum satuan pendidikan dan posisi pendidikan agama Islam.

Lembaga pendidikan ini adalah cikal bakal sekolah lembaga pendidikan di Indonesia, khususnya MA sebagai ormas Islam terbesar di Banten dan tersebar di luar Banten. Lembaga pendidikan Islam ini mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat pesat. Perubahan dan perkembangan ini mempengaruhi terhadap varian dan ideologi lembaga pendidikan Islam. Oleh karena itu penelitian ini memotret pendidikan MA dengan pendekatan kesejarahan sebagai pengantar dalam menjelaskan bagaimana kekuatan politik dan kebijakan pemerintah yang memunculkan dinamika pemikiran dan perkembangan MA, sehingga diperlukan strategi dan upaya dalam mengembangkan lembaga pendidikan.

Di lingkungan organisasi keagamaan yang memiliki lembaga pendidikan dapat membuat pola pikir masyarakat mengalami perubahan yang luar biasa.⁵⁶ Dalam proses pembentukan kembali kepada ide-ide dan budaya baru, melanggar keseimbangan dan stabilitas sosial telah memberikan kesempatan bagi cara inovatif pendidikan dalam ideologi dan politik di lembaga pendidikan, khususnya MA. Namun, masalah baru telah dihasilkan dari pendidikan ideologi dan politik, yang dapat ditempuh dengan cara dan praktik yang berimplikasi pada kebutuhan masyarakat. Kebangkitan besar-besaran terutama partai politik pada dekade pertama bahwa di zaman kemerdekaan, pesantren, madrasah dan

⁵⁶ Sumin; Li Lanyu; Li Likun Song, "An Exploration of Innovation of College Ideological and Political Education in New Era," *EDP Sciences*, (2014): 1-4.

sekolah dimiliki berdasarkan afiliasi politik yang saling bertentangan, yang terlibat dalam kegiatan politik yang berbeda. Dalam situasi politik seperti ini, konflik dan pertarungan politik antar partai dan di dalam partai seringkali berdampak besar terhadap institusi pendidikan yang terkait dengan lembaga tersebut. Reaksi mereka yang saling bertentangan menyebabkan perpecahan internal ketika kelompok-kelompok terakhir kemudian menjauh dan mendirikan madrasah sendiri yang secara politis akan bersekutu dengan NU ataupun Muhammadiyah.

Organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang mandiri, bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan kegiatan sosial berdasarkan Islam, berpedoman pada *Ahlussunnah wal-jama'ah* dan berasakan Pancasila,⁵⁷ MA menjadi sentral pendidikan di Banten dengan menggunakan kurikulum pembelajaran yang modern, karena peran MA yang mengelola lembaga pendidikan telah berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka, model pendidikan MA yang tetap menjaga marwah dan nilai agama sangat vital dalam menanamkan sistem nilai dan moral yang baik sebagai pusat peradaban dan untuk merespon perkembangan teknologi yang berdampak negatif.⁵⁸

Kebaruan disertasi ini dikuatkan dengan persoalan pengaruhnya terhadap perkembangan pendidikan Islam melalui empat periode perkembangan politik (Pra kemerdekaan, orde lama, orde baru dan orde reformasi). Kebijakan politik penguasa pada zamannya jelas telah berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan pendidikan Islam baik langsung maupun tidak langsung. Dalam bidang pendidikan Islam,

⁵⁷ Syibli Syarjaya dan Jihaduddin, *Dirosah Islamiyah I: Sejarah dan Khithah Mathlau'ul Anwar*, 11.

⁵⁸ Ahmad Huriyudin, *Jejak Keilmuan dan Corak Pemikiran Keagamaan KH Mas Abdurrahman Bin Jamal Al-Janakawi*, 29.

pengaruh yang ditimbulkan oleh kebijakan politik pemerintah adakalanya bersifat positif konstruktif namun tidak jarang juga yang negatif destruktif, seperti pada zaman pra kemerdekaan. Kebijakan politik pemerintah Belanda pada zaman pra kemerdekaan sangat kental dengan sikap diskrimatif, walaupun semua itu hanya demi kepentingan politik semata-mata. Pada periode berikutnya, yaitu orde lama sebuah harapan baru muncul ke tengah-tengah dunia pendidikan Islam dengan berdirinya Departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946 melalui usulan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) tertanggal 11 November 1945. Pendidikan Islam mulai mendapat angin segar dengan terbitnya beberapa kebijakan pemerintah melalui Depag yang terkait langsung dengan pendidikan Islam.

Pada era orde baru dikenal sebuah kebijakan yang cukup berpengaruh dan masih akrab ditelinga umat Islam sampai saat ini apalagi para pengelola pendidikan Islam, yaitu Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri) tahun 1975, No. 06/1975, 037/U/1975 dan 36/1975 tentang peningkatan mutu pendidikan Islam pada madrasah serta sebuah undang-undang tentang SISDIKNAS yaitu UU No. 2 Tahun 1989. Akhirnya pada era reformasi setelah kejayaan orde baru ditumbangkan oleh gerakan reformasi 1998 dan munculnya berbagai tuntutan perubahan disegala bidang kehidupan, termasuk pendidikan Islam, maka diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS yang memberi pengaruh cukup signifikan terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, khususnya di MA.

Dampak terhadap Pendidikan MA mulai dari zaman pra kemerdekaan dan kemerdekaan telah mengalami fregmentasi mulai dari rumah atau langgar seorang ulama melebur menjadi pesantren, sebuah lembaga pendidikan tradisional mengalami transformasi menjadi madrasah semenjak kedatangan Ki Mas Abdurahman dari Mekkah. Konflik internal, keluarnya NU dari Masyumi, persaingan dan lahirnya kelompok-kelompok reformis menjadikan pendidikan Islam sesuai dengan ciri khasnya, sekalipun demikian pendidikan modern MA, sekaligus terputusnya afiliasi Mathla'ul Anwar dengan NU pada 1952. Ketiga, kekecewaan anggota Mathla'ul Anwar dari kalangan tradisional terhadap independensi politik 1952. Fragmentasi semakin jelas dengan berdirinya madrasah dan pesantren yang didirikan di luar organisasi MA.

Hal ini terbukti dengan masuknya anggota-anggota baru dari berbagai kelompok Islam. Perubahan konsep keberagamaan dan sikap politik MA, sejak 1950an, juga berpengaruh terhadap perkembangan madrasahnyanya. Mathla'ul Anwar mengembangkan lembaga pendidikannya mengikuti kurikulum nasional, dengan ciri khas pengajaran Islamnya. Sama seperti MALNU model *boarding school* (sekolah berasrama), Anwarul Hidayah, dan Pendidikan Ahlussunah waljamaah dengan menggunakan pendidikan tradisional namun tetap mengikuti kurikulum pendidikan nasional untuk menjaga kelangsungan pengajaran kitab kuning bagi peserta didiknya.

Berdasarkan latar belakang sejarah munculnya MA, hal ini menyebabkan MA sangat prihatin terhadap pendidikan agama khususnya pendidikan tradisional pesantren dalam rangka menyebarkan ajaran Islam yang benar dan menjauhkan dari segala bentuk

kemusyrikan dan khurafat. Hal ini juga memperkuat peran MA sebagai organisasi Islam sesuai dengan perkembangan pendidikan Islam modern, sehingga seiring dengan perkembangan pendidikan di era modern, maka banyak asosiasi MA yang terkenal yaitu membentuk cendekiawan dan sarjana intelektual.

J. Sistematika Penulisan

Penelitian ini memuat 6 (enam) bab. Urutan bab didasarkan pada unsur variabel, prosedur dan sistematika secara bertahap yang dilakukan dalam penelitian. Argumen besar mencakup total substansi penelitian, yang selanjutnya dipecah ke dalam bab-bab penelitian. Setiap bab berisi satu argumen atau ide-ide yang ditentukan dalam beberapa sub, dan entitas terkait, sesuai dengan batasan masalah dan tujuan penelitian.

Bab 1 berisi latar belakang yang mendeskripsikan permasalahan dan kepentingan penelitian yang dilakukan, serta dirumuskan khusus pada identifikasi, pembatasan dan perumusan masalah. Bagian ini juga berisi ikhtisar temuan dan kajian penelitian terdahulu yang relevan, yang kemudian digunakan sebagai kerangka posisi teoretis. Pada akhirnya, sistematika penelitian merupakan refleksi struktur dan ruang lingkup penelitian.

Bab 2 berisi kajian teoritis tentang pengertian dan praktik pengumpulan politik, pergulatan ideologi keagamaan, relasi politik ideologi keagamaan dan wajah politik pendidikan serta pendidikan Islam di Indonesia.

Bab 3 berisikan jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data. Teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan teknik analisa data.

Bab 4 merupakan hasil penelitian yang secara khusus berisi hasil dan data sesuai dengan fokus penelitian ideologi keagamaan dan kebijakan pendidikan Mathla'ul Anwar dalam yang berisikan deskripsi, memetakan dan memotret metamorphosis wajah dan orientasi politik MA pendidikan yang secara empirik di lapangan terjawab melalui perkembangan pendidikan yang memunculkan dinamika pemikiran dan pendidikan, strategi dan upaya MA dalam mengembangkan pendidikan terimplementasikan.

Bab 4 Pembahasan yang meliputi bahwa politik pendidikan yang bergumul melalui proses ideologi keagamaan dan pendidikan, di dalamnya yang disajikan dalam bagian ini dianalisis secara empirik dan lapangan yang berdampak kepada lembaga pendidikan yang akan dikembangkan menjadi model pendidikan MA.

Bab 5 Bagian penutup. Seperti biasanya, merupakan bagian akhir dari penelitian, yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi pernyataan abstrak yang dirumuskan berdasarkan refleksi atas temuan dan hasil penelitian. Sedangkan saran berisi beberapa rekomendasi yang dapat digunakan sebagai pernyataan arahan untuk tindak lanjut, baik secara teoretis maupun praktis.